

# PROSIDING

SEMINAR NASIONAL FISIP UNILA  
(SEFILA) - 3 TAHUN 2019

*Agenda Baru Pembangunan Indonesia  
Berbasis Local Knowledge*



**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP  
UNIVERSITAS LAMPUNG (SEFILA) 3  
TAHUN 2019**

**TEMA: AGENDA BARU PEMBANGUNAN INDONESIA  
BERBASIS *LOCAL KNOWLEDGE***

**BANDAR LAMPUNG, 08 AGUSTUS 2019**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
TAHUN 2019**

**PROSIDING SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS LAMPUNG  
(SEFILA) 3 TAHUN 2019**

**Tema: Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis *Local Knowledge*  
Bandar Lampung, 08 Agustus 2019**

**Susunan Panitia Pelaksana**

Dr. Dedy Hermawan  
Dr. Robi Cahyadi Kurniawan  
Dr. Arif Sugiono  
Dr. Jenni Wulandari  
Arizka Warganegara, Ph.D  
Wulan Suciska, M.Si  
Damayanti, M.Si  
M.Hasbi Kurniawan, M.Si  
Tety Mujadilah, M.Si

**Steering Committee**

Dr. Syarief Makhya  
Dr. Bartoven Vivit Nurdin  
Dr. Ani Agus Puspawati  
Drs. Denden Kurnia Drajat  
Drs. Dadang Karya Bakti

**Reviewer**

Prof. Dr. Yulianto  
Intan Fitri Meutia, Ph.D  
Unang Mulkhan, Ph.D  
Dr. Ari Darmastuti  
Dr. Andi Corry  
Dr. Suropto

**Editor :**

Simon Sumanjoyo Hutagalung, M.P.A  
Ita Prihantika, M.A  
Moh. Nizar, M.A

**Penerbit**

FISIP Universitas Lampung  
vii + 239 hal : 21 x 29 cm  
Cetakan 1, Oktober 2019

**ISBN:978-623-91972-0-9**

**Alamat**

Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro, Komplek Unila  
Gedongmeneng Bandar Lampung, HP. 08154019877  
E-mail : [sefilafisip@fisip.unila.ac.id](mailto:sefilafisip@fisip.unila.ac.id), Website : [www.sefila.fisip.unila.ac.id](http://www.sefila.fisip.unila.ac.id)  
Hak Cipta dilindungi Undang-undang

ISBN 978-623-91972-0-9





## KATA PENGANTAR

Globalisasi telah memasuki era baru yang bernama revolusi industri 4.0. Revolusi industri 4.0 secara fundamental mengakibatkan berubahnya cara manusia berpikir dan berhubungan satu dengan yang lain. Era ini akan mendisrupsi berbagai aktivitas manusia dalam berbagai bidang, tidak hanya teknologi saja, namun juga bidang yang lain seperti ekonomi, sosial, dan politik. Pada bidang politik misalnya, gerakan-gerakan politis untuk mengumpulkan massa melalui konsentrasi massa telah digantikan dengan gerakan berbasis media sosial. Bidang pemerintahan pun kini juga ditantang untuk melaksanakan birokrasi secara efektif dan efisien berbasis *e-governance*.

Perkembangan media sosial yang masiv juga telah merekonstruksi struktur budaya masyarakat. Relasi sosial hubungan masyarakat kini lebih erat terbangun dalam dunia maya, sehingga hubungan dalam dunia nyata justru menjadi relatif. Paradigma bisnis pun bergeser dari penekanan *owning* menjadi *sharing* (kolaborasi) (Prasetyo & Trisyanti, 2018), sebagaimana merebaknya *e-commerce* yang menggeser bisnsi retail (toko fisik). Singkatnya, dalam disruptif akan terjadi *disruptive regulation*, *disruptive culture*, *disruptive mindset*, dan *disruptive marketing* (Khasali, 2018). Tantangan era baru ini tidak dapat diselesaikan dengan cara-cara yang sama seperti dalam konsep masa lampau. Revolusi industri 4.0 tidak mungkin hanya dihadapi dengan pengembangan teknologi tanpa melibatkan dinamika sosial di dalamnya. Perlu dirumuskan strategi kebijakan nasional melalui kesadaran dan kedewasaan berpikir

Hal tersebut menginisiasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung untuk mengadakan Seminar FISIP Unila (Sefila) 3 yang mengangkat tema mengenai “**Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge**”. Walaupun mengacu pada konteks ruang dan tempat, pengetahuan lokal (*local knowledge*) memiliki relevansi dalam proses pembangunan, karena memanfaatkan sumber daya yang minimal berbasis karakteristik sosial budaya setempat. Pengetahuan lokal ini dapat ditransfer menjadi kearifan lokal yang bisa dipertukarkan atau dilakukan lintas budaya (World Bank, 1998). Sehingga pengetahuan lokal memiliki elastisitas dalam berbagai masalah dan perubahan, termasuk mewarnai agenda pembangunan di Indonesia

Seminar ini diharapkan dapat menghasilkan kajian diskusi yang dapat berkontribusi dalam menyediakan alternatif solusi bagi agenda pembangunan di Indonesia menghadapi tantangan perubahan dinamika sosial saat ini. Pada akhirnya, luaran dari Seminar FISIP Unila juga diharapkan dapat terpublikasi melalui prosiding dan jurnal terakreditasi, sehingga hasil kajian dapat bermanfaat secara luas bagi kebutuhan pengembangan akademik dalam bidang sosial politik.

Segala puji bagi Tuhan yang telah menolong hamba-Nya menyelesaikan prosiding ini dengan penuh kemudahan. Prosiding ini disusun agar akademisi, mahasiswa dan peminat ilmu sosial politik dapat memperluas ilmu tentang ruang lingkup konsep maupun kebijakan ilmu sosial dan politik, khususnya di negara Indonesia, yang disajikan dari berbagai sumber. Walaupun prosiding ini mungkin kurang sempurna namun memiliki detail yang cukup jelas bagi pembaca. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusunan prosiding ini.

Bandar Lampung, 9 Oktober 2019  
Ketua Panitia SEFILA 2019

Dr. Dedy Hermawan, M.Si



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
IMPLIKASI DESENTRALISASI FISKAL TERHADAP KEMANDIRAN, KESEJAHTERAAN DAN KEMISKINAN: SEBUAH HUBUNGAN YANG TAK SELALU SEJALAN (Maulana Mukhlis dan Syarief Makhya) .....	1-11
INTEGRASI SISTEM INFORMASI PADA PEMERINTAHAN DENGAN <i>E- GOVERNMENT</i> (Lies Kumara Dewi dan Henni Kusumastuti).....	13-20
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA METRO NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN KOTA WISATA (Ita Prihantika, Bambang Utoyo, Tia Panca Rahmadhani, Sutiyo) .....	21-31
IMPLEMENTASI <i>DIGITAL GOVERNMENT</i> DALAM BIDANG PENDIDIKAN (STUDI TENTANG SISTEM PENILAIAN AKREDITASI BERBASIS ONLINE PADA BADAN AKREDITASI SEKOLAH/MADRASAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2019) (Eko Budi Sulistio) .....	33-41
KAJIAN PELUANG PIMPINAN WILAYAH NASYIATUL AISYIYAH LAMPUNG DALAM PENCEGAHAN KERENTANAN PEREMPUAN PADA KEJAHATAN NARKOBA (Dwi Wahyu Handayani) .....	43-49
<i>KERATUAN SEMAKA FOLKLORE: ETHNO-ECOTOURISM MODEL IN LAMPUNG INDIGENOUS MUSEUM TOURISM DEVELOPMENT</i> (Bartoven Vivit Nurdin) .....	51-59
PENDEKATAN PENGETAHUAN DAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENGEMBANGAN PARIWISATA HUTAN MANGROVE (Selvi Diana Meilinda dan Rizca Fiolanda).....	61-69
KEWIRAUSAHAAN SOSIAL ISLAMI: PEMBERDAYAAN MELALUI ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH (Keumala Hayati dan Indra Caniago) .....	71-74
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM KEGIATAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI UNTUK MENINGKATKAN HASIL PERTANIAN DI DESA SRITEJOKENCONO, KECAMATAN KOTAGAJAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH (Suwarno, Abdul Syani, Pairulsyah, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra).....	75-82
IMPLEMENTASI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA MELALUI BUDIDAYA PETERNAKAN IKAN AIR TAWARDI DUSUN BUKIT SULA, DESA BANDING AGUNG, KECAMATAN PUDUH PIDADA, KABUPATEN PESAWARAN (Pairulsyah, Yuni Ratnasari, Fuad Abdulgani, Dewi Ayu Hidayati, Riki Riyan Saputra) .....	83-87
PRINSIP <i>GOOD GOVERNANCE</i> DALAM RANGKA PEMBANGUNAN KETAHANAN PANGAN MELALUI PROGRAM LUMBUNG PANGAN MASYARAKAT (STUDI KELOMPOK WANITA TANI GUYUP RUKUN PEKON SUKOHARJO II	

KECAMATAN SUKOHARJO KABUPATEN PRINGSEWU). (Nurarifah, Rahayu Sulistiowati, dan Nana Mulyana).....	89-93
PERANAN MASYARAKAT LOKAL DALAM MEWUJUDKAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI PROVINSI LAMPUNG (Intan Fitri Meutia, Devi Yulianti, Panji Tryatmaja, Vera Yusnita) .....	95-101
MEMBANGUN KEMANDIRIAN MASYARAKAT TANI HUTAN KEMASYARAKATAN MELALUI PENGUATAN PERAN <i>STAKEHOLDERS</i> DALAM PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN (Dian Kagungan, Yulia Neta dan Hari Kaskoyo).....	103-112
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PESISIR MELALUI PENGEMBANGAN KLASTER IKAN DI PULAU PASARAN KOTA BANDAR LAMPUNG (Ali Imron, Dewie Brima Atika, Eko Budi Sulistio) .....	113-120
NEO NASIONALISME DAN REVOLUSI DIGITAL DI INDONESIA (Thomas Tokan Pureklolon) .....	121-127
NEW MEDIA SEBAGAI SARANA PROMOSI PARIWISATA LAMPUNG (Agus Mardihartono dan Yuli Evadianti).....	129-134
KEWIRAUSAHAAN TEKNOLOGI DIGITAL: POTENSI PEMBERDAYAAN PEBISNIS MILENIAL (Keumala Hayati dan Indra Caniago).....	135-138
PERAN KOMUNIKASI DALAM PEMBANGUNAN SUMBER DAYA MANUSIA (Herlintati, Fery Hendi Jaya, M. Fikri Akbar).....	139-143
KUALITAS LAYANAN, HARGA, DAN PERSEPSI BENEFIT MENGGUNAKAN FITUR <i>GO-PAY</i> (Ni Putu Widiyawati, Arif Sugiono, Diang Adistyia, Jeni Wulandari).....	145-157
PERILAKU KOMUNIKASI MASYARKAT TERHADAP PROGRAM STUDI ILMU PERPUSTAKAAN: STUDI PEMAKNAAN TERHADAP POSTING INFOGRAFIS TIRTO.ID (Purwanto Putra) .....	159-167
PELINDUNGAN BAHASA LAMPUNG DALAM PERUBAHAN BUDAYA DI PROVINSI LAMPUNG (Bendi Juantara dan Indra Bulan).....	169-176
APLIKASI <i>FILE TRANSFER PROTOCOL (FTP)</i> DALAM ADMINISTRASI DIGITAL (Hani Damayanti Aprilia, Mediya Destalia, Ida Vivi Pusvitha).....	177-184
NEGARA DAN KEANEKARAGAMAN HAYATI: MENGHADAPI TANTANGAN GLOBALISASI EKONOMI (Gita Paramita Djausal, Fitri Juliana Sanjaya, Eris Ardeanto) .....	185-189
PEMANFAATAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI BERBASIS <i>E-COMMERCE</i> BAGI UMKM DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (Roby Rakhmadi) .....	191-196
ANALISIS KONTEN INFORMASI <i>E-GOVERNMENT</i> PADA SITUS WEB PEMERINTAH KABUPATEN PESAWARAN (Eka Yuda Gunawibawa, Hestin Oktiani, Gita Hilmi Prakoso) .....	197-206
PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA INDUSTRI PARIWISATA (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI LAMPUNG SELATAN) (Dedy Hermawan dan Simon S. Hutagalung).....	207-217

PENGARUH KUALITAS LAYANAN WEBSITE TERHADAP NIAT PEMBELIAN KEMBALI YANG DIMEDIASI OLEH KEPUASAN KONSUMEN LAZADA.CO.ID DI BANDAR LAMPUNG Anindhyta Sekar Wangi, Dorothy Rouly Haratua Pandjaitan, dan Mudji Rachmat Ramelan.....	2019-226
<i>SUCCESS FACTORS FOR SERVICE INNOVATION THE DJKI OF COPYRIGHT ONLINE RECORDING SYSTEM</i> Dian Sari dan Erlin Windia Ambarsari .....	227-235
<b>LAMPIRAN</b>	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA BERBASIS PENGETAHUAN LOKAL (Bustanul Arifin)	
AGENDA BARU PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERBASIS “PENGETAHUAN LOKAL” (Muhammad Najib Azca)	
KEARIFAN LOKAL DALAM PEMBANGUNAN SDM DI LAMPUNG (Nina Yudha Aryanti)	



# PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM TATA KELOLA INDUSTRI PARIWISATA (STUDI TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN OBJEK WISATA DI LAMPUNG SELATAN)

Dedy Hermawan<sup>a</sup> dan Simon S. Hutagalung<sup>b</sup>

<sup>ab</sup> *Jurusan Ilmu Administrasi Negara, FISIP, Universitas Lampung*

korespondensi: [hermawan.dedy@yahoo.com](mailto:hermawan.dedy@yahoo.com)

## **Abstract**

*This research focuses on maritime research which includes strategic issues in the development of the tourism industry and research topics on bureaucratic reform and public services in tourism. The objectives of this research include; (a). categorizing forms of community participation created in the management of tourism in the tourism area in Lampung Province, (b). formulate potential factors from stakeholders and the community that hinder or encourage the successful participation of tourism management communities in the regions in Lampung Province. Thus recommendations can be generated in the form of things that need to be anticipated or strengthened in the design of stakeholder participation policies.*

*This research wants to describe and explain the symptoms and trends that appear in the focus of the study. The survey technique was carried out in collecting the first focus data, while in the second focus the collection of data was carried out through in-depth interviews, observation and focus group discussions. From the results of the study note that community participation in thinking, energy and material for the development of attractions is different if the community is asked to participate if not asked. But the community already has a readiness to participate in the development of attractions, it's just that people still have to be actively invited by the manager to participate.*

*Keywords: tourism, stakeholder collaboration, tourism reform*

## **Abstrak**

Riset ini yang mengambil fokus riset bidang maritim yang didalamnya tercakup isu strategis pengembangan industri pariwisata dan topik riset reformasi birokrasi dan layanan publik pariwisata. Adapun tujuan dari riset ini antara lain; (a). melakukan kategorisasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang tercipta dalam pengelolaan pariwisata pada daerah pariwisata di Provinsi Lampung, (b). menyusun faktor-faktor potensial dari para *stakeholder* dan masyarakat yang menghambat atau mendorong keberhasilan partisipasi masyarakat pengelolaan pariwisata pada daerah di Provinsi Lampung. Dengan demikian dapat dihasilkan rekomendasi berupa hal-hal yang perlu diantisipasi atau diperkuat dalam rancangan kebijakan partisipasi *stakeholder* tersebut.

Penelitian ini hendak mendeskripsikan dan menjelaskan gejala-gejala dan kecenderungan yang muncul dalam fokus kajian. Teknik survei dilakukan dalam pengumpulan data fokus pertama, sementara pada fokus kedua pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi dan *focus group discussion*. Dari hasil penelitian diketahui jika partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tenaga dan materi untuk pengembangan objek wisata berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Namun masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi.

*Keyword : pariwisata, kolaborasi stakeholder, reformasi pariwisata*

---

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan media komunikasi memiliki pengaruh besar bagi wajah sosial dan budaya dunia, seperti mesin cetak Gutenberg oleh Johan Gutenberg. Bagi filsuf Inggris Francis Bacon (1561-1626), percetakan, mesiu dan kompas merupakan trio yang telah mengubah keadaan negara

dan wajah segala sesuatu di muka bumi (Asa Briggs & Peter Burke, 2000). Jauh dari penemuan mesin cetak Gutenberg cikal bakal media komunikasi sudah muncul dari masa pra-sejarah yaitu dengan komunikasi gambar atau visual.

Di Indonesia pembangunan hampir menjadi kata kunci bagi segala hal. Salah satunya yaitu pembangunan pariwisata. Sebagai negara yang memiliki banyak potensi pariwisata, Indonesia tentu dapat melakukan pembangunan disektor pariwisata. Pembangunan pariwisata pada intinya merupakan suatu aktivitas yang menggali segala potensi pariwisata baik yang berasal dari sumberdaya alam, sumberdaya manusia, maupun sumberdaya buatan manusia yang semuanya memerlukan penanganan secara menyeluruh. Pembangunan pariwisata yang berhasil adalah pembangunan pariwisata yang dilakukan secara bersama termasuk “membangun bersama masyarakat” sehingga pembangunan pariwisata dapat memberikan keuntungan secara ekonomi, sosial maupun budaya kepada masyarakat setempat. Tujuan dari pembangunan pariwisata yang melibatkan masyarakat diantaranya yaitu, 1) memberdayakan masyarakat melalui pembanguan pariwisata, 2) meningkatkan peran dan partisipasi masyarakat agar dapat memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, maupun budaya dari pembangunan pariwisata 3) memberikan kesempatan yang seimbang kepada semua anggota masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan. Oleh karena itu salah satu pendekatan yang didapat digunakan untuk pengembangan pariwisata berbasis masyarakat adalah pendekatan partisipatif.

Sementara itu partisipasi diartikan sebagai keterlibatan, tetapi aspek keterlibatan ini sering diartikan secara sempit. Suatu program dikatakan melibatkan masyarakat ketika masyarakat sudah diajak melaksanakan suatu program tertentu. Padahal sebenarnya sebuah program dikatakan bersifat partisipatif apabila masyarakat sudah terlibat sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan hasil(Daraba, 2017). Agar timbul rasa memiliki dari masyarakat, maka masyarakat haruslah selalu dilibatkan dalam pengelolaan areal tempat wisata. Pelibatan tersebut seharusnya mulai dari perencanaan, yaitu apapun yang ingin diprogramkan oleh pengelola tempat pariwisata didiskusikan dengan masyarakat. Dengan harapan masyarakat akan merasa memiliki program tersebut, dan turut membantu kelancaran program tersebut (Hermawan & Hutagalung, 2017). Pada dasarnya masyarakat itu sendiri berhak ikut serta dalam pengelolaan pariwisata. Seperti yang tertuang dalam Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, dalam pasal 19 ayat 2 bahwa setiap orang atau masyarakat dalam atau di sekitar destinasi pariwisata mempunyai hak prioritas menjadi pekerja atau buruh, konsinyasi dan pengelolaan. Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang kepariwisataan tersebut maka ada landasan yang mengatur tentang hak masyarakat untuk bersama-sama mengelola pariwisata.

Partisipasi masyarakat dirasa sangat penting dalam proses pembangunan. Menurut Adisasmita (2006) dalam buku pembangunan perdesaan, masyarakat diajak untuk berperan serta dan didorong untuk berpartisipasi karena masyarakat dianggap mengetahui tentang permasalahan dan kepentingan atau kebutuhan mereka. Mereka memahami tentang keadaan lingkungan sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Selain itu ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting. Pertama adalah fokus utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. Memandang masyarakat sebagai subyek dalam pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka memanusiakan masyarakat. Kedua partisipasi menimbulkan rasa harga diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Ketiga partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-hak individu untuk dilibatkan dalam pembangunan mereka sendiri. Keempat partisipasi merupakan cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi kas daerah(Tjokrowinoto, 1996). Itulah sebabnya mengapa partisipasi masyarakat dianggap penting dalam proses pembangunan, karena masyarakat itu sendiri yang lebih mengetahui, tentang permasalahan dan kebutuhan, baik itu dalam bidang lingkungan, sosial dan ekonomi, termasuk dalam proses pembangunan, atau pengembangan pariwisata.

Dalam konteks kebijakan pemerintah, kondisi partisipasi tersebut akan tergantung dari kapasitas birokrasi pengelola, apabila birokrasi pengelola visioner, responsif dan antisipatif maka dapat terbangun pengelolaan sektor pariwisata yang mandiri berbasis dari partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji dua pertanyaan penelitian sebagai berikut; (1). Apa saja kategorisasi bentuk-bentuk partisipasi masyarakat yang tercipta dalam pengelolaan pariwisata pada daerah di Provinsi Lampung?, (2). Apa saja faktor-faktor yang menghambat atau mendorong keberhasilan partisipasi masyarakat pengelolaan pariwisata pada daerah di Provinsi Lampung?.

## METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei, yaitu penyelidikan yang diadakan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala yang ada dan mencari keterangan-keterangan secara faktual, baik tentang institusi sosial, ekonomi, atau politik dari suatu kelompok ataupun suatu daerah (Nazir, 1999). Secara teknis survei dilakukan pada masyarakat di sekitar objek wisata, aparat pemerintah daerah dan pelaku usaha daerah. Pengambilan responden dalam penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, berdasarkan tujuan digunakan *simple random sampling* sehingga diperoleh 100 orang informan yang terdiri dari 10 orang aparat pemerintah daerah, 10 orang pelaku usaha daerah dan 80 orang masyarakat sekitar objek wisata. Berikut sebaran informan masyarakat yang berada di sekitar objek wisata unggulan Lampung Selatan;

Tabel. Sebaran Informan Pada Sekitar Objek Wisata Unggulan Lampung Selatan

No	Nama Objek Wisata	Jumlah Informan
1	Pantai Bagoes Kalianda	10
2	Pantai Embe Kalianda	10
3	Pantai Batu Rame	10
4	Pantai Guci Batu Kapal	10
5	Pantai Canti Indah	10
6	Air Terjun Way Kalam	10
7	Gunung Rajabasa	10
8	Air Terjun Cicurug	10
Jumlah		80

Untuk menganalisis tingkat partisipasi masyarakat digunakan analisis deskriptif, yaitu meneliti status sekelompok manusia, obyek, satu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Partisipasi dalam penelitian ini diukur dalam partisipasi pemikiran, tenaga dan materi. Teknik analisis dengan menggunakan skala likert dalam skor 1-3. Sementara dalam hal faktor yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata dapat dianalisis dengan melihat faktor internal dan eksternal dari dalam dan luar masyarakat Lampung Selatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Kategorisasi Bentuk Partisipasi Masyarakat yang Tercipta dalam Pengelolaan Pariwisata*

Verhagen (1980) menyatakan bahwa, partisipasi merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian: kewenangan, tanggung jawab, dan manfaat. Theodorson & Theodorson (1969) mengemukakan bahwa dalam pengertian sehari-hari, partisipasi merupakan keikutsertaan atau keterlibatan seseorang (individu atau warga masyarakat) dalam suatu kegiatan tertentu. Keikutsertaan atau keterlibatan yang dimaksud di sini bukanlah bersifat pasif tetapi secara aktif ditujukan oleh yang bersangkutan. Oleh karena itu, partisipasi akan lebih tepat diartikan sebagai keikutsertaan seseorang didalam suatu kelompok sosial untuk mengambil bagian dalam kegiatan masyarakatnya, di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Oakley & Programme, 1991).

Dengan demikian partisipasi merupakan peran aktif atau tidak aktifnya anggota dalam kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dengan kata lain partisipasi bermakna mengambil bagian atau ikut serta dalam suatu kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat (Murdiyanto, 2011). Tingkat partisipasi masyarakat dapat diukur dengan tiga pendekatan, yaitu :

1. Dimensi Pemikiran, yaitu partisipasi dalam bentuk pemikiran dalam usaha mengembangkan objek wisata. Partisipasi ini akan terlihat dari masukan pemikiran, baik tentang cara pengembangan, paket program, sampai pada media yang digunakan dalam pengembangan objek wisata.
2. Dimensi Tenaga, yaitu sumbangan berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan objek wisata. Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan area kunjungan, pemandu wisata, penyediaan sarana prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan.

3. Dimensi Materi, yaitu sumbangan berupa materi dalam pengembangan objek wisata, seperti pengumpulan dana pembangunan.

Masyarakat lokal menjadi bagian yang paling memahami keadaan daerahnya tentu akan mampu memberikan masukan yang sangat berharga. Masyarakat lokal dengan pengetahuan serta pengalamannya menjadi modal yang sangat besar dalam melaksanakan pembangunan. Masyarakat lokal yang mengetahui apa permasalahan yang dihadapi serta juga potensi yang dimiliki oleh daerahnya(Pakpahan, 2018).

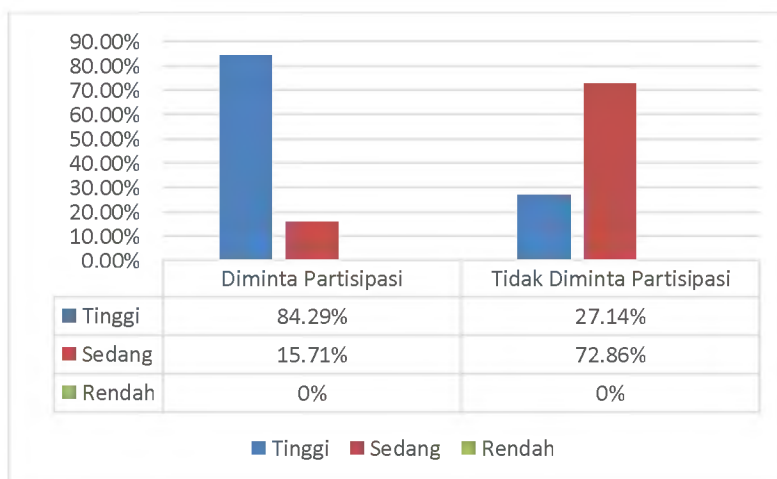
Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di Pada daerah wisata di Lampung Selatan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk tinggi. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sebesar 65,71% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan hanya 34.29% yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 37,14% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 62,86% yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah .

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tenaga dan materi untuk pengembangan objek wisataberbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran, tenaga dan materi masyarakat masih 'malu-malu' untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak ecara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi. Secara lebih detail kesiapan masyarakat dalam partisipasi akan diuraikan dalam masing-masing dimensi partisipasi.

1. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemikiran

Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di pada daerah wisata di Lampung Selatan dalam pemikiran tentang kesadaran pegembangan objek wisatamenunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk tinggi. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sebesar 84.29% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan hanya 15.71%yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kategori ini terjadi pada responden yang apabila diminta untuk partisipasi. Kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 27.14% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 72.86% yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi rendah .

Gambar 1. Distribusi Tingkat Partisipasi Pemikiran Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata di Lampung Selatan



Partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tentang kesadaran berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Tingkat



partisipasi yang tinggi mengalami penurunan sebesar 57.15%, dan beralih ke tingkat partisipasi sedang, sehingga tingkat partisipasi sedang mengalami kenaikan sebesar 57.15%. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran tentang kesadaran masyarakat masih 'malu-malu' untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemikiran tentang kesadaran untuk mengembangkan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi dalam mengembangkan objek wisata, kesediaan menjadi pengurus objek wisata dan kesediaan hadir dalam pertemuan untuk membahas objek wisata.

Berdasarkan ketiga hal tersebut kesediaan menjadi pengurus perlu mendapat perhatian, karena terdapat 29,03% responden yang tidak bersedia menjadi pengurus meskipun diminta menjadi pengurus, dan terdapat 54,84% responden yang tidak bersedia menjadi pengurus objek wisata meskipun tidak diminta. Hal ini berarti bahwa kesadaran warga untuk berpartisipasi masih terbatas pada kesadaran dalam bentuk pemikiran belum pada partisipasi secara langsung sebagai pengurus. Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di pada daerah wisata di Lampung Selatan dalam pemikiran tentang kemauan masyarakat dalam pengembangan objek wisata menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk tinggi. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sebesar 55.71% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan hanya 44.29% yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kategori ini terjadi pada responden yang apabila diminta untuk partisipasi. Kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 41.43% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 58.57% yang termasuk sedang serta tidak ada responden yang memiliki kategori partisipasi rendah.

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tentang kemauan berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Tingkat partisipasi yang tinggi mengalami penurunan sebesar 14.28%, dan beralih ke tingkat partisipasi sedang, sehingga tingkat partisipasi sedang mengalami kenaikan sebesar 14.28%. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran tentang kemauan masyarakat masih 'malu-malu' untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pemikiran tentang kemauan untuk mengembangkan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi dalam memberikan usulan atau saran baik dalam pertemuan ataupun di luar pertemuan mengenai paket program wisata, penentuan harga, dan evaluasi terhadap kegiatan di objek wisata.

Berdasarkan ketiga hal tersebut kesediaan menjadi pengurus perlu mendapat perhatian, karena terdapat 31% - 41% responden yang tidak bersedia memberikan saran atau usulan mengenai program wisata, penentuan harga, dan evaluasi terhadap kegiatan di objek wisata. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan program wisata, penentuan harga, dan evaluasi terhadap kegiatan di objek wisata menjadi tugas dan kewajiban sepenuhnya dari pengelola yang betul-betul memahami dan mengerti tentang program wisata, penentuan harga, dan evaluasi terhadap kegiatan di objek wisata. Hal ini berarti bahwa kemauan warga untuk berpartisipasi masih terbatas pada kemauan dalam bentuk pemikiran, belum pada partisipasi secara langsung dalam penentuan program wisata, penentuan harga, dan evaluasi terhadap kegiatan di objek wisata.

## 2. Tingkat partisipasi masyarakat dalam tenaga

Partisipasi masyarakat dalam tenaga merupakan sumbangan berupa tenaga atau fisik yang diperlukan dalam pengembangan objek wisata. Partisipasi ini dapat dilihat dari kesiapan secara fisik dalam mempersiapkan area kunjungan, pemandu wisata, penyediaan saran prasarana dan penyediaan peralatan penunjang kegiatan.

Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di pada daerah wisata di Lampung Selatan dalam tenaga pada saat persiapan kegiatan objek wisata menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk tinggi. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sebesar 80.00% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan hanya 14.29% yang termasuk sedang serta 5.71% responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kategori ini terjadi pada responden yang apabila diminta untuk partisipasi. Kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 60.00%

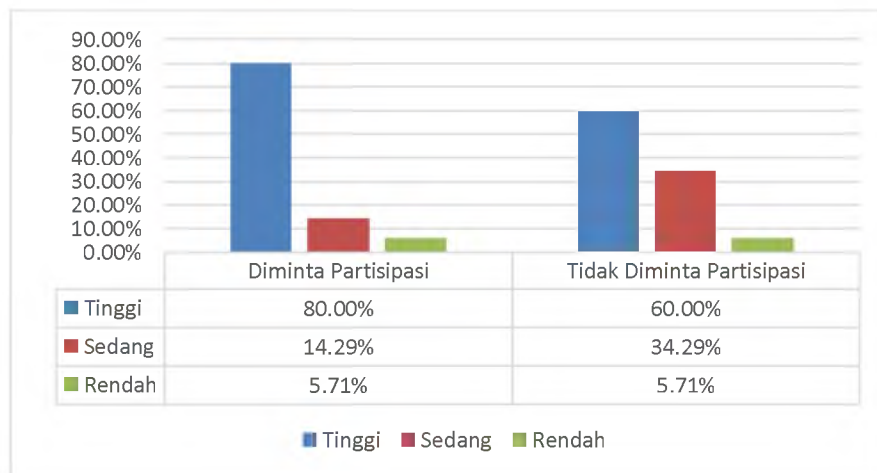
responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 34.29% yang termasuk sedang serta 5.71% responden yang memiliki kategori partisipasi rendah.

Partisipasi masyarakat dalam tenaga dalam persiapan kegiatan di objek wisata berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Tingkat partisipasi yang tinggi mengalami penurunan sebesar 65.71%, dan beralih ke tingkat partisipasi sedang, sehingga tingkat partisipasi sedang mengalami kenaikan sebesar 65.71%. Hal ini berarti bahwa dalam partisipasi tenaga dalam persiapan kegiatan masyarakat masih 'malu-malu' untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dengan tenaga dalam persiapan kegiatan untuk mengembangkan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi dengan tenaga dalam persiapan kegiatan baik kegiatan kebersihan tempat, alat dan merawat alat yang digunakan.

Berdasarkan ketiga hal tersebut partisipasi dengan tenaga dalam kebersihan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan objek wisata perlu mendapat perhatian, karena terdapat 25,61% responden yang tidak bersedia membantu dalam kebersihan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan objek wisata. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan di objek wisata menjadi tugas dan kewajiban sepenuhnya dari pengelola yang betul-betul memahami dan mengerti alat-alat yang digunakan dalam kegiatan objek wisata. Hal ini berarti bahwa berpartisipasi masyarakat dalam tenaga masih terbatas pada kesiapan terhadap kebersihan dan bukan yang berkaitan dengan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan objek wisata.

Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di Pada daerah wisata di Lampung Selatan dalam tenaga pada saat pelaksanaan kegiatan objek wisata menunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk sedang. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi sebesar 35.71% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 32.86% yang termasuk sedang serta 31.43% responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kategori ini terjadi pada responden yang apabila diminta untuk partisipasi. Kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 15.71% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 15.71% yang termasuk sedang serta 68.57% responden yang memiliki kategori partisipasi rendah.

Gambar 2. Distribusi Tingkat Partisipasi Tenaga Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata di Lampung Selatan



Masyarakat dalam tenaga dalam pelaksanaan kegiatan di objek wisata berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Tingkat partisipasi yang tinggi mengalami penurunan sebesar 20%, dan tingkat partisipasi sedang mengalami penurunan sebesar 17,15%, beralih menjadi partisipasi rendah, sehingga tingkat partisipasi rendah mengalami kenaikan sebesar 37,14%. Hal ini berarti bahwa dalam partisipasi tenaga dalam pelaksanaan kegiatan masyarakat masih segan untuk berpartisipasi. Perubahan besar



terdapat pada tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat belum memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dengan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan untuk mengembangkan objek wisata. Masyarakat lebih mempercayakan pelaksanaan kegiatan pada pengelola dan karang taruna sebagai pelaksana terutama sebagai pemandu dan pemandu aktif dalam kegiatan objek wisata. Adapun tingkat partisipasi tersebut dapat diamati dari gambar berikut:

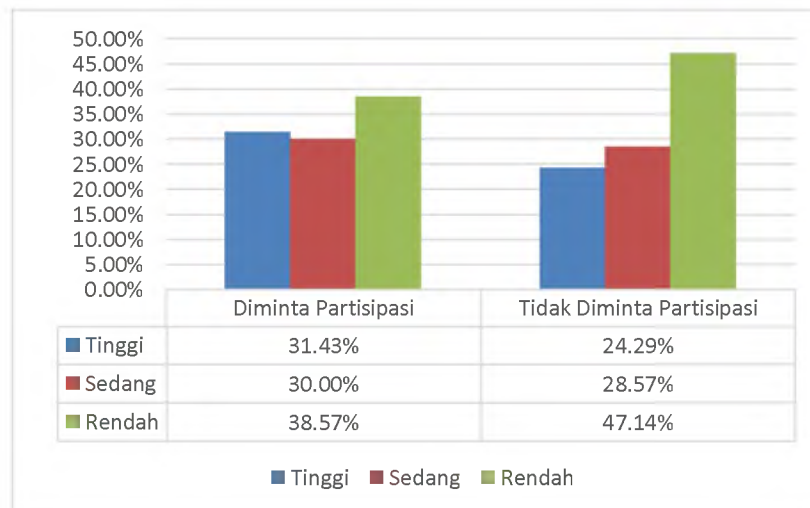
Berdasarkan hal tersebut partisipasi dengan tenaga dalam pelaksanaan kegiatan perlu mendapat perhatian, karena terdapat 35% - 77% responden yang tidak bersedia menjadi pemandu dan pemandu aktif dalam pelaksanaan kegiatan objek wisata. Hal ini disebabkan karena masyarakat berpendapat bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan dalam kegiatan di objek wisataterutama pemandu pengunjung menjadi tugas dan kewajiban sepenuhnya dari pengelola yang betul-betul memahami dan mengerti kegiatan objek wisata, apalagi sebagian besar pengunjung masih berusia 30 tahun kebawa, sehingga leih cocok kalau dipandu oleh karang taruna.

### 3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam materi

Partisipasi masyarakat dalam materi merupakan segala bentuk sumbangan berupa materi dalam pengembangan objek wisata, seperti pengumpulan dan pembangunan dan materi lainnya. Partisipasi ini merupakan partisipasi yang kelihatan secara fisik, meskipun memiliki makna yang sama besarnya dengan partisipasi lainnya.

Hasil perhitungan tingkat partisipasi masyarakat di pada daerah wisata di Lampung Selatan dalam materi untuk pengembangan objek wisatamenunjukkan bahwa tingkat partisipasi warga termasuk rendah. Hal ini ditunjukkan dari angka partisipasi hanya sebesar 31.43% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 30.00% yang termasuk sedang serta 38.57% responden yang memiliki kategori partisipasi yang rendah. Namun kategori ini terjadi pada responden yang apabila diminta untuk partisipasi. Kondisi berbeda pada responden yang apabila tidak diminta dalam berpartisipasi, terjadi penurunan tingkat partisipasi yaitu hanya 24.29% responden termasuk kategori partisipasi tinggi dan 28.57% yang termasuk sedang serta 47.14% responden yang memiliki kategori partisipasi rendah. Adapun distribusi tersebut dapat dilihat pada gambar sebagai berikut:

Gambar 3 . Distribusi Tingkat Partisipasi Materiil Masyarakat Dalam Pengembangan Wisata di Lampung Selatan



Masyarakat dalam materi dalam pelaksanaan kegiatan di objek wisata berbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Tingkat partisipasi yang tinggi mengalami penurunan sebesar 2,86%, dan tingkat partisipasi sedang mengalami penurunan sebesar 4,28%, beralih menjadi partisipasi rendah, sehingga tingkat partisipasi rendah mengalami kenaikan sebesar 7,14%. Hal ini berarti bahwa dalam partisipasi materi masyarakat masih segan untuk berpartisipasi. Kondisi ini berkaitan dengan keadaan perekonomian masyarakat di Pada daerah wisata di Lampung Selatan yang relatif masih rendah.

Masyarakat lebih mempercayakan materi untuk kegiatan di objek wisata kepada pengelola dan karang taruna sebagai pelaksana objek wisata.

### ***Faktor Penghambat Dan Pendorong Keberhasilan Partisipasi Masyarakat Pengelolaan Pariwisata***

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata ialah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata disegala bentuk (ide/pikiran, uang, materi/barang, dan tenaga) adalah merupakan bagian besar dari kesadaran yang dimiliki oleh masyarakat (Dewi & Hermawan, 2018). Menurut Kuntjoro-Jakti (1994), bahwa faktor utama yang mendukung dalam partisipasi dalam pelaksanaan pembangunan, yaitu (1) kemauan/kesadaran; (2) kemampuan; dan (3) kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi. Dimana terlihat bahwa kesadaran/kemauan pribadi yang mendorong untuk ikut serta berpartisipasi dalam pembangunan, karena adanya suatu kepedulian atau kesadaran dan kemauan warga untuk ikut terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembangunan tersebut.

Berdasarkan hasil penulis dilapangan untuk keterlibatan masyarakat dalam memberikan bantuan dalam bentuk sumbangan dana atas dasar kesadaran/kemauan dari masyarakat itu sendiri seperti pembangunan sarana jalan memang belum ada. Masyarakat masih mengandalkan bantuan dana dari pihak pemerintah daerah tetapi pihak pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terbantu dengan sumbangan dana yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan yang beralokasi di Kabupaten Lampung Selatan. Selain akan kesadaran/kemauan masyarakat, juga masih adanya inisiatif dukungan masyarakat dalam pengembangan objek wisata di Pemerintah daerah Lampung Selatan. Hal ini dibuktikan dengan adanya inisiatif kontribusi masyarakat secara nyata dalam bentuk dalam rebug warga serta keterlibatan masyarakat yang berperan serta oleh masyarakat untuk merencanakan hingga membangun beberapa fasilitas bersama, seperti pos keamanan atau kamar mandi bersama hingga sekarang sudah selesai tahap pembangunannya.

Seperti yang ungkapkan para ahli oleh Cohen & Uphoff (1980) bahwa, inisiatif atau prakarsa dalam berpartisipasi bisa berasal dari bawahan atau masyarakat itu sendiri (bottom up) tidak hanya berasal dari pemerintah (top down) dimana dalam pembangunan bentuk swadaya yang berupa prakarsa dan inisiatif merupakan titik awal dari partisipasi masyarakat. Dengan demikian, adanya inisiatif merupakan kontribusi masyarakat yang muncul sebagai indikasi bahwa masyarakat masih memiliki kepedulian yang tinggi untuk selalu mendukung pengembangan objek wisata yang bisa bermanfaat bagi masyarakat yang tinggal di Kabupaten Lampung Selatan.

Sementara itu, menurut Plummer (2013), beberapa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah : (a) Pengetahuan dan keahlian, (b) Pekerjaan masyarakat, (c) Tingkat pendidikan dan buta huruf, (d) Jenis kelamin, (e) Kepercayaan terhadap budaya tertentu, dan (f) Faktor-faktor eksternal. Dari temuan di lapangan dapat diketahui partisipasi masyarakat masih rendah.

Dapat dianalisis keenam faktor tersebut dalam lingkup pengembangan objek wisata di Lampung Selatan, dimana diketahui: (1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat dari hasil penelitian ternyata masih rendah, tersedianya berbagai objek wisata yang diharapkan dampaknya memberikan kesejahteraan kepada warga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Daerah Lampung Selatan ternyata masih kurang dipahami oleh banyak masyarakat awam. Karena kekurangtahuan dan kekurangpahaman masyarakat tersebut maka partisipasi masyarakat menjadi rendah.

(2) Pekerjaan Masyarakat, latar belakang pekerjaan masyarakat bisa menjadi salah satu faktor yang menghambat partisipasi masyarakat. Jika dilihat dari jenis pekerjaan tertentu yang memiliki atau tidak memiliki waktu luang untuk berpartisipasi. Mayoritas masyarakatnya mempunyai latar belakang pekerjaan sebagai buruh, petani di lahan sendiri, buruh bangunan, PNS, dan wiraswasta. Dari hasil wawancara dengan para informan dapat diketahui bahwa latar belakang pekerjaan menjadi faktor penghambat tingkat partisipasi masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat tidak memiliki waktu luang untuk berpartisipasi, namun semua kembali lagi pada individu masing-masing karena ada pula yang menyebutkan bahwa sebarang kesibukan dan keterbatasan waktu luang jika merasa ingin dan berniat berpartisipasi pasti akan ikut berpartisipasi. Dengan demikian pekerjaan masyarakat dapat dikatakan sebagai faktor yang menghambat.

(3) Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf pada Masyarakat, latar belakang tingkat pendidikan dan buta huruf juga merupakan salah satu faktor yang menghambat keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan program pariwisata. Kemampuan masyarakat dalam berfikir serta meluapkan ide-ide bisa berkaitan dengan latar

belakang pendidikan. Dari hasil penelitian menyebutkan bahwa latar belakang pendidikan menjadi faktor penghambat pada keikutsertaan masyarakat dalam partisipasi kenyataan di lapangan mengingat sebagian besar pendidikan terakhir warga adalah SMA, hal ini dapat diketahui dalam data pendidikan terakhir warga.

(4) Jenis kelamin, jenis kelamin juga merupakan salah satu faktor penghambat dalam partisipasi masyarakat. Jumlah warga berjenis kelamin laki-laki lebih sedikit daripada jumlah warga yang berjenis kelamin laki-laki. Disini kita akan melihat apakah jenis kelamin menjadi faktor penghambat partisipasi masyarakat. Dari hasil wawancara kepada para informasn, jenis kelamin bukan faktor yang mutlak dalam partisipasi masyarakat namun memang ada beberapa sektor yang hanya bisa dilakukan oleh lelaki yaitu pada pemandu wisata adventure dan berisiko tinggi, karena rasa keberanian laki-laki lebih dibutuhkan dalam sektor ini. Namun secara keseluruhan jenis kelamin bukanlah merupakan faktor penghambat partisipasi masyarakat

(5) Heterogenitas masyarakat, dalam hal ini berupa kepercayaan terhadap budaya tertentu yang merupakan faktor penghambat karena masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi karena masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi akan membutuhkan solidaritas sosial yang tinggi guna menghasilkan kolaborasi partisipasi masyarakat. Masyarakat Lampung Selatan sendiri memang sangat mengunggulkan budaya, mengingat di Lampung Selatan dikenal banyak suku budaya yaitu Lampung, Banten, Jawa dan lainnya. Kepercayaan atau budaya tertentu yang berkembang di masyarakat memang beragam, diantaranya yaitu adanya keyakinan yang bertentangan dengan budaya-budaya terdahulu yang menyangkut dengan ritual tertentu. Tetapi di masa sekarang ini, sudah jarang dan hanya ditemukan satu atau dua orang yang karena alasan kepercayaan atau budaya tertentu sehingga enggan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan. Dari penelitian lapangan ditemukan bahwa kepercayaan terhadap budaya tertentu tidak menjadi faktor yang menghambat tingkat partisipasi masyarakat. Pada awalnya memang ada satu atau dua warga yang menentang, tapi lama-kelamaan masyarakat bisa menerima

(6) Faktor eksternal (*stakeholder* yang berwenang dalam program), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap kemajuan Daerah Lampung Selatan. Petaruh kunci adalah siapa yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan, atau dalam hal ini pihak Bappeda. Petaruh kunci yang dimaksud disini juga bisa dimaksudkan sampai kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Lampung Selatan yang memegang peran penting dalam pengembangan pariwisata Daerah Lampung Selatan. Dari penelitian lapangan faktor ini menjadi faktor pendukung. Ada temuan lapangan dari pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Lampung Selatan sendiri penghambatnya dikarenakan kebijakan dan program pariwisata yang tidak mengikutsertakan masyarakat sejak perencanaan, sehingga kemudian program yang dilakukan cenderung monoton sehingga masyarakat menjadi enggan dan bosan untuk berpartisipasi, dan pendanaan kegiatan yang terbatas.

Usaha yang dilaksanakan *stakeholder* untuk menggalang partisipasi masyarakat dalam pengembangan objek wisata. Usaha yang telah dilakukan dalam menggalang partisipasi masyarakat pada pengembangan ini sudah banyak, mulai dari melakukan sosialisasi, hingga memberikan wadah bagi warga yang ingin menggali potensinya dengan mengajak warga untuk bergabung dalam asosiasi-asosiasi yang ada. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Bappeda dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Lampung Selatan telah mulai melakukan usaha-usaha untuk menggalang partisipasi masyarakat. Seperti mengajak warga untuk bisa menjadi anggota pokdarwis, menjalin kemitraan dengan pihak luar untuk membantu menarik minat warga untuk berpartisipasi seperti pelatihan-pelatihan, serta ada pelatihan yang disediakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Lampung Selatan, kemudian ada juga usaha lainnya seperti pengkaderan generasi muda dengancaramenjadi *event organizer* sehingga memiliki pendapatan yang diperoleh apabila dapat berpartisipasi langsung. Media masa juga membantu dengan adanya *website*, dan blog yang membahas Daerah Lampung Selatan, hal ini menjadi faktor pendukung dalam pengembangan program.

## PENUTUP

Partisipasi masyarakat dalam pemikiran, tenaga dan materi untuk pengembangan objek wisataberbeda apabila masyarakat diminta untuk berpartisipasi dengan apabila tidak diminta. Terjadi kecenderungan penurunan partisipasi dari partisipasi yang diminta menjadi partisipasi yang tanpa diminta. Hal ini berarti bahwa dalam pemikiran, tenaga dan materi masyarakat masih 'malu-malu' untuk berpartisipasi, namun penurunan tersebut masih dalam tingkat sedang. Tidak



ada perubahan dalam tingkat partisipasi yang rendah, artinya masyarakat sudah memiliki kesiapan untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata, hanya saja masyarakat masih harus diajak secara aktif oleh pengelola untuk berpartisipasi.

Faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pengelolaan pariwisata ialah kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengembangan objek wisata disegala bentuk (ide/pikiran, uang, materi/barang, dan tenaga) meskipun harus melalui ajakan dari pihak pemerintah daerah. Adapun faktor penghambat partisipasi dalam pengelolaan pariwisata di Lampung Selatan antara lain:

- (1) Pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang pengelolaan pariwisata yang masih rendah,
- (2) Pekerjaan Masyarakat, latar belakang pekerjaan masyarakat yang variatif dengan beban kerja yang kurang memungkinkan untuk berperan aktif.
- (3) Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf pada Masyarakat, kondisi ini menjadi faktor yang menghambat keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk memahami dan melaksanakan program.
- (4) Heterogenitas masyarakat, dalam hal ini berupa kepercayaan terhadap etnis, suku dan budaya tertentu yang merupakan faktor penghambat karena masyarakat dengan tingkat heterogenitas yang tinggi akan membutuhkan solidaritas sosial yang tinggi guna menghasilkan kolaborasi partisipasi masyarakat.
- (5) Faktor eksternal (*stakeholder* yang berwenang dalam program), faktor-faktor eksternal ini dapat dikatakan petaruh (*stakeholder*), yaitu semua pihak yang berkepentingan dan mempunyai pengaruh terhadap kemajuan Daerah Lampung Selatan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. (2006). *Pembangunan Pedesaan dan Perkotaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Cohen, J. M., & Uphoff, N. T. (1980). Participation's place in rural development: Seeking clarity through specificity. *World Development*, 8(3), 213–235. [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(80\)90011-X](https://doi.org/10.1016/0305-750X(80)90011-X)
- Daraba, D. (2017). PENGARUH PROGRAM DANA DESA TERHADAP TINGKAT PARTISIPASI MASYARAKAT DI KECAMATAN GALESONG UTARA KABUPATEN TAKALAR. *Sosiohumaniora*, 19 (1), 52–58. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i1.11524>
- Dewi, W. K., & Hermawan, D. (2018). PARTISIPASI CIVIL SOCIETY DALAM MENGEMBANGKAN PARIWISATA DI KABUPTEN LAMPUNG SELATAN (STUDI PADA KELOMPOK SADAR WISATA DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN). *Administratio: Jurnal Ilmiah Administrasi Publik Dan Pembangunan*, 8(2). Retrieved from <http://jurnal.fisip.unila.ac.id/index.php/administratio/article/view/457>
- Hermawan, D., & Hutagalung, S. S. (2017). Membangun Partisipasi Publik Berbasis Perilaku: Studi Kasus di Provinsi Lampung. In *Transformasi Sosial Menuju Masyarakat Informasi Yang Beretika dan Demokratis* (pp. 35–54). Retrieved from <http://repository.ut.ac.id/7205/>
- Kuntjoro-Jakti, D. (1994). Perangkap Pengkategorian Abstrak” atau Persoalan yang Dihadapi dalam Memecahkan Masalah Keterbelakangan Dalam Dorodjatun Kuntjorojakti. *Kemiskinan Di Indonesia*.
- Murdiyanto, E. (2011). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN DESA WISATA KARANGGENENG, PURWOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN*. 11.
- Nazir, M. (1999). Metode penelitian sosial. *Jakarta: PT Bina Aksara*.
- Oakley, P., & Programme, W. E. (1991). *Projects with People: The Practice of Participation in Rural Development*. International Labour Organization.
- Pakpahan, R. V. (2018). *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Pengelolaan Dana Desa (DD) di Desa Parlombuan Kecamatan Pangaribuan Kabupaten Tapanuli Utara*. Retrieved from <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/7598>
- Plummer, J. (2013). *Municipalities and Community Participation: A Sourcebook for Capacity Building*. <https://doi.org/10.4324/9781315071794>

Theodorson, G. A., & Theodorson, A. G. (1969). A Modern Dictionary of Sociology. Retrieved August 4, 2019, from Eweb:1917 website: <https://repository.library.georgetown.edu/handle/10822/762995>

Tjokrowinoto, M. (1996). *Pembangunan: Dilema dan tantangan*. Pustaka Pelajar.

Verhagen, K. (1980). Changes in Tanzanian Rural Development Policy 1975–1978. *Development and Change*, 11(2), 285–295. <https://doi.org/10.1111/j.1467-7660.1980.tb00070.x>

Hermawan  
dan Hutagalung:  
Partisipasi  
Masyarakat dalam  
Tata Kelola  
Industri  
Pariwisata (Studi  
terhadap  
Partisipasi ...

217